

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI MELALUI
GOAL-ORIENTED EVALUATION MODEL DI DESA NGERANGAN
KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN**

Imania Nurjanah¹, Novi Sabila Rosyidah², Tri Mardiana³, Heru Maryanto⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten

Imania0808@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and evaluate the policy of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in an effort to improve community welfare in Ngerangan Village, Bayat District, Klaten Regency. The evaluation model used is the Goal Oriented Evaluation Model by Tyler with four indicators of program success measurement, namely objectives, results, stakeholder involvement, and program context. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and literature reviews with primary and secondary data sources. The informant selection technique used purposive sampling technique. The results of the study indicate that the implementation of the BPNT program in Ngerangan Village has been carried out well although there are still several obstacles based on program success indicators. The objective indicator shows that the objectives of the BPNT program in Ngerangan Village have been successfully implemented with clear and specific objectives, although there are several beneficiaries who are not on target. The outcome indicator shows that the output of the BPNT program in Ngerangan Village is in accordance with government regulations, namely Rp. 200,000 per Beneficiary Family (KPM) each month is realized in the form of rice, eggs, oil, chicken meat, and fruit, although the disbursement of funds is often late. Indicators of stakeholder involvement can be seen from the active participation, coordination, and commitment of stakeholders who work together according to applicable mechanisms. The implementation of the BPNT program has a positive impact on meeting basic food needs and improving the standard of living of the poor. Obstacles such as delays in disbursement of funds and social jealousy are due to invalid recipient data. For this reason, it is necessary to periodically validate BPNT recipient data and survey KPM to ensure accurate data, so that the BPNT program in Ngerangan Village can run optimally.

Keywords: *Non-Cash Food Assistance (BPNT), Policy Evaluation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Adapun model evaluasi yang digunakan adalah *Goal Oriented Evaluation Model* oleh Tyler dengan empat indikator pengukuran keberhasilan program, yaitu tujuan, hasil, keterlibatan *stakeholder*, dan konteks program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Ngerangan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala berdasarkan indikator keberhasilan program. Indikator tujuan menunjukkan bahwa tujuan program BPNT di Desa Ngerangan berhasil diimplementasikan dengan tujuan yang jelas dan spesifik, meskipun terdapat beberapa penerima manfaat yang kurang tepat sasaran. Indikator hasil menunjukkan bahwa output dari

program BPNT di Desa Ngerangan ini sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Rp. 200.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya diwujudkan dalam bentuk beras, telur, minyak, daging ayam, dan buah, meskipun pencairan dana sering terlambat. Indikator keterlibatan *stakeholder* terlihat dari partisipasi aktif, koordinasi, dan komitmen *stakeholder* yang bekerja sama sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan program BPNT memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan kecemburuan sosial dikarenakan data penerima yang kurang valid. Untuk itu, perlu dilakukan validasi data penerima BPNT secara berkala dan survei terhadap KPM untuk memastikan data yang akurat, sehingga program BPNT di Desa Ngerangan dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Evaluasi Kebijakan

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak ke-empat di dunia berdasarkan perhitungan *World Population Review* tahun 2024. Banyaknya jumlah penduduk yang beranekaragam memicu timbulnya berbagai permasalahan yang variatif, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan minimal, dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, papan (makanan), tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 9,03%, setara dengan 25,22 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023, di mana persentasenya mencapai 9,36%. Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,00 per kapita per bulan, mengalami kenaikan 5,9% dibandingkan Maret 2023. Dari jumlah tersebut, komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) berkontribusi signifikan, mencerminkan dominasi kebutuhan pangan dalam menentukan status kemiskinan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), presentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 ini mencapai 12,04%. Adapun jumlah masyarakat miskinnya mencapai 141,84 ribu jiwa dengan garis kemiskinan pada 2024 ini tercatat sebesar Rp.505.826,00 per kapita per bulan. Dengan data tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Klaten telah mengalami penurunan presentase kemiskinan dari tahun 2023 sebesar 12,28% dengan jumlah masyarakat miskin mencapai 144,43 ribu jiwa, dan garis kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 144,43,00 per kapita per bulan. Hal itu menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten meskipun belum terlalu signifikan.

Pangan menjadi kebutuhan dasar yang paling vital bagi manusia dalam kehidupannya. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, manusia tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari

secara optimal. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi aspek krusial yang harus diprioritaskan dalam upaya pembangunan suatu negara. Ketahanan pangan berkaitan erat dengan pemenuhan pangan dan gizi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan, kualitas, dan keragaman pangan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kebutuhan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menyediakan akses pemenuhan makanan dan nutrisi dalam jumlah, kualitas, dan harga yang sesuai kondisi masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. (Maghfira, 2020).

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan membutuhkan program strategis guna terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara. Melalui berbagai program baru yang dirancang oleh pemerintah, diharapkan angka kemiskinan di Indonesia dapat mengalami penurunan. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dirancang oleh pemerintah guna mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu alternatif program yang dirancang pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat miskin Indonesia adalah program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini diberikan secara non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui sistem elektronik, bekerjasama dengan bank milik negara dan e-Warung yang telah ditunjuk. Pemerintah berharap melalui program BPNT ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki gizi anak-anak bangsa. (Alive M. Kawung et al., 2020).

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan pangan dasar setiap satu bulan sekali kepada masyarakat penerima manfaat melalui kartu elektronik, sebagai program lanjutan dari program Raskin dan Rastra (Beras Sejahtera) yang diterapkan pada 2018 lalu. Bantuan ini awalnya diberikan sebesar Rp.110.000 per KPM per bulan yang kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.150.000 per KPM per bulan. Pada April 2020, bantuan kembali meningkat menjadi Rp.200.000 per bulan, yang disalurkan dalam bentuk saldo elektronik dan digunakan untuk membeli kebutuhan pangan tertentu seperti beras, telur, daging ayam, sayur, dan buah-buahan di E-warung. Mulai Oktober 2022, bantuan sebesar Rp200.000 diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga penerima dapat membelanjakannya di warung terdekat guna mendukung usaha masyarakat setempat. (Rakhmadani, 2022).

Kecamatan Bayat tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk termiskin kedua di Kabupaten Klaten menurut laporan dari *Solopos.com*, dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 11.886 keluarga dan angka individunya mencapai 42.882 jiwa dari jumlah penduduk

di Kecamatan Bayat sebanyak 63.541 jiwa. Dengan laporan tersebut, Kecamatan Bayat perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pra survei, telah diketahui bahwa presentase kemiskinan di Desa Ngerangan sebesar 53,4% atau 1009 keluarga miskin dari 1899 kepala keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa perlu adanya alternatif kebijakan yang berorientasi pada usaha meminimalkan angka kemiskinan di tingkat desa. Salah satu program yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Ngerangan untuk mengatasi masalah tersebut adalah program BPNT. Mengacu pada hasil pengamatan pra-riset telah ditemukan bahwa penyaluran program BPNT untuk warga miskin di Desa Ngerangan belum berjalan sesuai harapan. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin dan memenuhi kriteria penerima BPNT yang tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebaliknya, ada pula masyarakat yang masuk dalam tingkat ekonomi menengah ke atas, mampu, dan memiliki usaha, justru terdaftar sebagai KPM BPNT. Adanya permasalahan yang demikian memicu munculnya kecemburuan sosial antar masyarakat dan dapat dikatakan bahwa sasaran penyaluran BPNT masih belum merata. Selain itu, permasalahan mengenai minimnya kesadaran pihak pendamping dan penyalur program BPNT terhadap pentingnya edukasi dan sosialisasi sebelum waktu pencairan bantuan dilaksanakan, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan bantuan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian latar belakang tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan program BPNT di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui *Goal-Oriented Evaluation Model* di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan program BPNT di Desa Ngerangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Menurut Wayne Parsons dalam (Laher & Masrich, 2017) mengartikan bahwa evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu kinerja dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program. Evaluasi merupakan

proses analisis, penilaian, dan pengukuran yang dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui sejauh mana program dapat dijalankan sesuai perencanaan, sekaligus mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program yang dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan yang disepakati. Sedangkan, kebijakan menurut Fredrich dalam (Winarno, 2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai usulan yang berisi arahan Tindakan yang dikemukakan oleh seorang individu, kelompok atau unit pemerintahan pada ruang lingkup tertentu. Tindakan yang diusulkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah, yang kemudian ditetapkan sebagai kebijakan publik berdasarkan prosedur tertentu dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu penilaian, pengukuran, atau analisis yang dilakukan secara sistematis, dalam kurun waktu tertentu untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Evaluasi kebijakan dapat menjadi alat ukur keberhasilan dan kegagalan program, dimana hasil dari evaluasi dapat dijadikan acuan perbaikan program selanjutnya. Melalui evaluasi kebijakan ini, permasalahan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan akan mampu teridentifikasi lebih dini, sehingga ketercapaian tujuan kebijakan dapat tercapai.

Goal-Oriented Evaluation Model Oleh Ralph W. Tyler

Goal-oriented evaluation model (Model evaluasi berorientasi pada tujuan) merupakan model evaluasi yang menitikberatkan terhadap pencapaian *goal* (tujuan) dari suatu program yang dilaksanakan berdasarkan pengukuran sejauh mana tujuan program dapat tercapai sebagaimana rencana yang telah ditetapkan. Model ini juga dapat diartikan sebagai pendekatan dalam evaluasi yang fokus terhadap tujuan guna mengukur efektivitas dan tingkat efisiensi program yang dijalankan terhadap potensi pencapaian tujuan yang diharapkan. Model evaluasi berorientasi tujuan mengutamakan ketercapaian tujuan program melalui proses pelaksanaan program yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkesinambungan. Model evaluasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas kinerja program dan membantu dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk pedoman perbaikan dan perubahan kebijakan program berikutnya. *Goal-oriented evaluation model* menurut Tyler menggolongkan bahwa terdapat beberapa indikator pengukuran keberhasilan program antara lain :

a. Tujuan (*Goals*)

Penetapan tujuan yang mengarah pada ketercapaian hasil program yang direncanakan secara jelas dan spesifik. Pengukuran indikator tujuan ini dapat dilakukan berdasarkan

ukuran 3 (tiga) variabel yang terdiri dari 1) Relevansi tujuan yang berkaitan dengan keterkaitan antara tujuan yang ditetapkan dengan kebutuhan yang ada. 2) Keterukuran tujuan meliputi kemampuan untuk mengukur ketercapaian tujuan berdasarkan kriteria yang jelas dan spesifik. 3) Keterjangkauan tujuan, yaitu kemampuan ketercapaian tujuan yang berorientasi pada hasil realistis yang dapat dicapai dalam batasan waktu, anggaran, dan kapasitas yang ada.

b. Hasil

Pengukuran ketercapaian tujuan program berdasarkan pengumpulan dan analisis data temuan, seperti hasil wawancara, tes, penilaian kinerja, dan observasi. Indikator hasil diukur berdasarkan tingkat capaian *output* yang dihasilkan dan manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan program, dimana indikator hasil mengacu pada hasil akhir atau ketercapaian target yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

c. Keterlibatan *Stakeholder*

Pengukuran ketercapaian tujuan program yang berfokus pada partisipasi seluruh pihak terkait dalam proses penetapan tujuan hingga evaluasi program dilaksanakan. Variabel pengukuran indikator keterlibatan *stakeholder* yaitu, 1) Partisipasi pihak pelaksana dengan pihak penerima manfaat, mengukur sejauh mana stakeholder dan pihak penerima manfaat mengacu pada keterlibatan aktif dari pihak pelaksana dan penerima untuk mendorong ketercapaian tujuan. 2) Umpan balik berbagai pihak, berkaitan dengan respon atau daya tanggap pihak pelaksana dalam menyikapi setiap masalah atau masukan yang berpotensi terhadap target pencapaian tujuan. 3) Keberhasilan komunikasi antar pihak terkait, meliputi proses interaksi yang baik antar pihak yang terlibat dalam upaya pencapaian tujuan sehingga informasi dapat diterima secara akurat.

d. Konteks Program

Pengukuran ketercapaian tujuan yang didasarkan pada konteks pelaksanaan program dan kondisi lingkungan. Variabel pengukuran indikator konteks program meliputi, 1) Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, mengacu pada sejauh mana ketersediaan kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi dan dimanfaatkan secara optimal. 2) Pengaruh faktor eksternal, mengacu pada berbagai elemen atau kondisi yang berasal dari luar suatu sistem, organisasi, atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan, perilaku atau kinerja dalam upaya mencapai tujuan. 3) Kondisi dan dinamika sosial masyarakat, mengacu pada keadaan dan perubahan yang terjadi dalam struktur, hubungan, dan

interaksi antar individu, kelompok, atau masyarakat yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan yang dicetuskan oleh pemerintah pusat, disalurkan non-tunai setiap bulan sekali melalui kartu elektronik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai program lanjutan dari program Raskin dan Rastra (Beras Sejahtera). Selain memberikan bantuan pangan untuk menanggulangi kemiskinan dan krisis pangan secara luas, penyaluran BPNT juga ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Menurut Gultom et.al (2021: 41), penyaluran program BPNT ini diharapkan mampu memberi dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perekonomian keluarga penerima manfaat terhadap jangkauan akses layanan keuangan yang luas.

Penerima BPNT merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergolong dalam kriteria keluarga miskin dan tertulis dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan tolak ukur 25% masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah dari daerah pelaksana program. Sumber data daftar penerima bantuan dari program BPNT telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dimana penerima program diprioritaskan pada masyarakat miskin atau rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Adapun persyaratan untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yaitu : 1) Gaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan tidak terdaftar sebagai pegawai aktif atau pensiunan. 2) Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIK-NG). 3) Tidak memiliki keterlibatan menjadi pendamping sosial di program tertentu. 4) Berasal dari keluarga miskin dan terdata dalam deretan paling bawah data kemiskinan. 5) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang valid serta terdaftar dalam data Dukcapil. Pengajuan data nama KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut dapat dilakukan oleh pihak kelurahan kepada Dinas Sosial. Masyarakat yang telah menjadi penerima BPNT akan melakukan regridasi, sekaligus aktivasi rekening dan pemberian kartu elektronik atau Kartu Keluarga Sejahtera yang berisi saldo untuk belanja bahan kebutuhan pangan melalui E-warung yang telah tersedia.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima dana bantuan yang masuk langsung ke rekening sebesar Rp. 200.000/bulan, dimana proses penransferan dilakukan oleh Bank HIMBARA atau Himpunan Bank Milik Negara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, melainkan dapat digunakan untuk membeli/ditukar dengan bahan pangan yang tersedia di e-Warung yang ditunjuk sebagai penyedia kebutuhan pencairan program bantuan. Dana bantuan dapat didistribusikan menjadi bahan kebutuhan pangan yang berupa beras, gula, telur, buah, minyak, daging ayam, tepung, atau bahan dasar pangan lainnya. Pemilihan bahan pangan dalam program BPNT ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan KBM sebagai sumber penemuan nutrisi dan gizi, sehingga bahan pangan yang diperoleh bisa berubah sesuai kondisi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2015), metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan gambaran fenomena atau mendeskripsikan setiap kejadian yang sebenarnya secara menyeluruh dan mendalam, dituangkan dalam bentuk teks narasi. Penelitian ini menitikberatkan pada konteks pembahasan evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berdasarkan model evaluasi berorientasi tujuan (*goal-oriented evaluation model*) oleh Tyler yang terdiri dari 4 (empat) variabel yakni, ketercapaian tujuan, hasil, keterlibatan *stakeholder*, dan konteks program. Subjek dalam penelitian ini meliputi pihak penyalur BPNT Desa Ngerangan dan masyarakat penerima bantuan Desa Ngerangan, sementara objek penelitiannya berada di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan (*Literature Research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dan penelaahan terhadap beberapa kajian teori, buku, dokumen, *literature*, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Peneliti menganalisis hubungan antara data yang diperoleh dengan teori yang dijadikan acuan. Adapun teknik pemilihan informan dalam wawancara menggunakan *purposive sampling*, dimana informan atau narasumber dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan informan dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data dan perolehan hasil penelitian yang akurat, karena informan yang dipilih adalah orang yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelaksanaan program BPNT di Desa Ngerangan yang terdiri dari Perangkat Desa dan masyarakat penerima program BPNT.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer dapat diartikan sebagai data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung tanpa perantara, baik dari individu maupun kelompok yang terlibat langsung pada proses

pelaksanaan. Data ini dikumpulkan melalui narasumber atau informan, yang berperan sebagai sumber informasi atau data di lokasi penelitian. Kemudian untuk data sekunder dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data informasi yang sebelumnya sudah ada dan berfungsi sebagai pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan data penelitian, sehingga peneliti tetap dapat melakukan penelitian melalui data-data publikasi. Data sekunder juga sebagai instrumen penelitian yang terdiri dari data yang sifatnya visual, seperti dokumen penting, buku-buku, jurnal, situs web, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga setiap data yang dijadikan acuan dapat dibuktikan kepastian datanya dan memperoleh hasil penelitian yang akurat. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2014: 246) yang terdiri dari 3 (tiga) tahap analisis, pertama, reduksi data yaitu, usaha untuk membuat rangkuman inti proses dari data penelitian yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci. Kedua, penyajian data yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian data, bagan, dan kolom dari analisis dan deskripsi data hasil penelitian. Ketiga, mengambil kesimpulan (verifikasi data), dilakukan dengan cara menyusun hasil penelitian terkait menjadi satu kesatuan informasi yang utuh berdasarkan hasil analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dilakukan di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Desa Ngerangan terdiri dari 19 Dukuh, 13 RW, dan 32 RT dengan jumlah penduduk terbanyak ke-dua se-Kecamatan Bayat yaitu 5.748 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk yang beranekaragam menimbulkan berbagai permasalahan yang variatif, salah satunya masalah kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan di Desa Ngerangan tercatat sebesar 53,4% atau 1009 keluarga miskin dari jumlah total 1899 keluarga. Untuk menekan peningkatan angka kemiskinan di Desa Ngerangan, Pemerintah Desa mendorong pelaksanaan program BPNT dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan meringankan beban pengeluaran bagi keluarga miskin. Dalam pelaksanaannya, program BPNT di Desa Ngerangan telah diberlakukan sejak tahun 2018 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 909 keluarga, dimana data penerima bersifat fluktuatif. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada setiap periode pencairan yaitu satu bulan sekali berupa dana bantuan sebesar Rp. 200.000 yang langsung

masuk pada rekening penerima, kemudian dibelanjakan dalam bentuk bahan pangan dasar melalui e-Warung yang telah ditunjuk.

Pelaksanaan program BPNT dapat memberikan dampak yang positif apabila pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya kurang maksimal maka tujuan program tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi guna memastikan program dapat berjalan dengan optimal. Evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengetahui hasil dan capaian dari pelaksanaan program berdasarkan indikator-indikator yang termuat dalam Model Evaluasi Berorientasi Tujuan (*Goal Oriented Evaluation Model*) berikut :

Tujuan (*Goals*)

Indikator *goals* atau tujuan dalam model evaluasi program digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator tujuan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan apakah program tersebut terlaksana sesuai rencana dan memberikan dampak yang positif. Untuk itu, penting sekali mengetahui sejauh mana program bisa terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya dapat selaras dengan perencanaan awal. Tujuan dari sebuah program merupakan prioritas dan fokus utama dalam pelaksanaan program, hal itu karena apabila tujuan dapat tercapai, maka program tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika tidak bisa mencapai tujuan, maka program dinilai gagal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Eka Kurniasari selaku Kasi Pelayanan Desa Ngerangan menyatakan bahwa tujuan program BPNT sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan cukup jelas dan spesifik. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperbaiki asupan gizi bagi masyarakat kurang mampu atau kelompok sasaran. Tujuan program BPNT dianggap realistis dan dapat dicapai dalam batasan waktu, anggaran, serta kapasitas sumber daya yang ada. Hal itu memberikan tantangan pada pihak pemerintah desa dalam melaksanakan program BPNT tersebut. Selain itu, program BPNT ini juga dirancang untuk mendukung dan meningkatkan usaha masyarakat melalui penyediaan bahan pangan melalui sistem penyalurannya yang melibatkan e-Warung. Sistem penyaluran berbasis elektronik melalui e-Warung telah membantu meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Dengan adanya e-Warung, membantu masyarakat dalam penyediaan bahan-bahan pangan yang dibutuhkan.

Tujuan program BPNT juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu karena melalui program BPNT ini masyarakat dapat terbantu dalam pemenuhan pangan dan gizi mereka. Hal itu disampaikan langsung oleh masyarakat penerima manfaat melalui wawancara bersama Ibu Satini selaku Kelompok Penerima Manfaat (KPM), beliau mengatakan bahwa pelaksanaan program BPNT dapat memangkas beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar seperti beras dan telur dapat terpenuhi mengingat harganya yang semakin naik di pasaran. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masyarakat penerima yang dianggap kurang tepat sasaran, dimana masyarakat yang sebenarnya kurang memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) justru menerima bantuan. Sementara keluarga miskin atau rentan miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, justru terlewatkan dalam pendataan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi penerima bantuan agar program ini dapat mencapai sasaran yang sesuai dan memberikan manfaat secara maksimal kepada mereka yang membutuhkan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan program BPNT di Desa Ngerangan sudah dapat di implementasikan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan adanya pengakuan dari KPM bahwa keberadaan program BPNT di Desa Ngerangan ini memberi pengaruh yang baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Hasil

Indikator hasil merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai dampak langsung dari pelaksanaan sebuah program atau kebijakan terhadap penerima manfaat. Indikator hasil berfokus pada perubahan nyata yang terjadi setelah program dilaksanakan, baik bentuk manfaat yang diterima maupun bagaimana program dapat meningkatkan kualitas hidup atau perilaku masyarakat. Indikator ini mencakup hasil atau *output* atau hasil program yang dikeluarkan dan diterima secara langsung oleh masyarakat dalam bentuk yang nyata. Selain itu, indikator hasil juga meliputi *outcome* yaitu dampak atau perubahan yang terjadi setelah program dijalankan dan bagaimana program tersebut dapat memberi dampak jangka Panjang yang dirasakan oleh penerima manfaat. Dalam konteks Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngerangan, indikator hasil melibatkan beberapa aspek, seperti peningkatan akses masyarakat miskin terhadap bahan pangan, perbaikan pola konsumsi gizi, dan efisiensi distribusi bantuan. Evaluasi hasil menjadi tahap paling penting untuk memastikan bahwa program mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tarmi sebagai salah satu penerima program BPNT Desa Ngerangan menjelaskan bahwa *output* yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 per bulan dan disalurkan langsung ke rekening elektronik yang terhubung dengan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) milik masing-masing KPM. Namun tak jarang juga pencairan mengalami keterlambatan dan dilaksanakan dua bulan atau tiga bulan dengan nominal Rp.400.000 sampai Rp.600.000, hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan program dimana keterlambatan pencairan membuat masyarakat harus menunda pembelian bahan pangan. Dana bantuan yang sudah dicairkan, dapat langsung dibelanjakan dan diwujudkan dalam bentuk bahan pangan melalui e-Warung yang ditunjuk. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Slamet selaku Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Ngerangan yang menyampaikan bahwa dalam proses pencairan dana sering mengalami permasalahan seperti keterlambatan pencairan yang tidak dapat ditangani oleh pihak Desa Ngerangan. Hal itu dikarenakan proses pencairan dilakukan langsung oleh dinas sosial sehingga pihak desa tidak bisa mengontrol jadwal pencairan dana BPNT. Meskipun demikian, *output* dari program BPNT di Desa Ngerangan ini sudah sesuai dengan peraturan yang disahkan oleh pemerintah. Besaran uang yang diterima telah sesuai dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat tanpa adanya pengurangan atau potongan sedikitpun dari pihak-pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara bersama Ibu Yuli selaku penerima manfaat program BPNT di Desa Ngerangan, beliau menyampaikan terkait kebermanfaatannya program BPNT yang dinilai memberikan dampak baik bagi keberlangsungan hidup. Dengan adanya bantuan dana sebesar Rp.200.000 per bulan, bahan pangan yang semula jarang dibeli karena keterbatasan ekonomi kini bisa dibeli dengan bantuan tersebut sehingga pola makan dan kebutuhan gizi menjadi terpenuhi. Pertanyaan tersebut selaras dengan pengakuan dari penerima manfaat program BPNT lainnya, yaitu Ibu Satini yang menambahkan bahwa program BPNT mampu membantu memangkas beban pengeluaran keluarga. Karena uang yang seharusnya dibelanjakan bahan pangan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hasil dari program BPNT di Desa Ngerangan yang meliputi *output* dan *outcome* sudah berhasil dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa kendala.

Keterlibatan Stakeholder

Indikator keterlibatan *stakeholder* berdasarkan model evaluasi berorientasi tujuan (*Goal-Oriented Evaluation Model*) menitikberatkan pada pengukuran peran aktif, koordinasi, komunikasi, dan responsivitas *stakeholder* dalam upaya pencapaian tujuan program, dimana

indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana partisipasi *stakeholder* dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab menurut bagiannya. Para *stakeholder* dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tetap berorientasi pada ketercapaian tujuan melalui koordinasi yang baik antar-*stakeholder*. Keberagaman sikap dan perilaku *stakeholder* harus mampu diselaraskan oleh peraturan yang ada, sehingga kesatuan tindakan dan sinergitas ke arah pencapaian tujuan dapat tercipta untuk pelaksanaan program yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Eka Kurniasari selaku Kasi Pelayanan Desa Ngerangan menyatakan bahwa seluruh pihak pelaksana program BPNT yang terdiri dari Pemerintah Desa, Operator Desa, Pendamping BPNT, dan Pemilik e-warung yang ditunjuk dapat berpartisipasi secara aktif dan baik dalam proses pelaksanaan program BPNT dari tahap persiapan hingga pada tahap pencairan. Para pelaksana program BPNT bekerjasama dalam upaya pencapaian tujuan dan berkomitmen terhadap keberhasilan program. Selain itu, para *stakeholder* dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Ngerangan juga memiliki tingkat respon yang positif dan kesiapan dalam menangani kendala di lapangan yang baik, sehingga permasalahan yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Para *stakeholder* berupaya untuk selalu berkontribusi, berkoordinasi, dan menjalin hubungan komunikasi yang baik terhadap para penerima program, hal ini bertujuan agar pelaksanaan program BPNT mampu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui bantuan sosial non-tunai yang ditujukan kepada masyarakat miskin, yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial. Para *stakeholder* sangat menjunjung tinggi integritas dan kedisiplinan untuk menunjang ketercapaian tujuan program sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Agus Slamet selaku Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Ngerangan menjelaskan bahwa telah dibentuk struktur organisasi dalam proses pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Desa Ngerangan sebagai acuan tugas, fungsi, serta wewenang dari setiap individu pelaksana atau *stakeholder* yang tertulis secara jelas dan diketahui oleh seluruh anggota penyelenggara bantuan, sehingga semua dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya masing-masing untuk mengoptimalkan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non-Tuna di Desa Ngerangan dijalankan oleh seluruh pelaksana program dengan berdasar kepada peraturan dan prosedur pelaksanaan yang berlaku.

Konteks Program

Indikator konteks program dalam *Goal-Oriented Evaluation Model* berfokus pada pengukuran keberhasilan tujuan berdasarkan konteks kebermanfaatan program dan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan program. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dicetuskan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Kementerian Sosial bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam upaya pemenuhan kebutuhan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan non-tunai yang diberikan pada setiap tahap penyaluran yaitu, satu bulan sekali atau pada periode waktu tertentu. Program ini juga menjadi alternatif pemerintah dalam peningkatan akses masyarakat dengan penghasilan rendah minim dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai hak dasarnya sebagai warga negara. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebutuhan nutrisi dan gizi, memberikan akses pangan bagi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas pedagang eceran (e-Warung). Keberhasilan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ditentukan oleh respon lingkungan sekitar yang menjadi faktor penghambat dan pendukung ketercapaian tujuan program. Program yang sukses akan didukung oleh faktor internal dan eksternal yang terintegrasi dengan baik, sehingga mampu mendorong pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan optimal. Sebaliknya, apabila kondisi internal dan eksternal tidak terkoordinasi dengan baik, maka ketercapaian tujuan juga akan terhambat.

Berdasarkan wawancara dari Ibu Eka Kurniasari selaku Kasi Pelayanan Desa Ngerangan menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan program yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Ngerangan, ketersediaan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Ketersediaan sumber daya yang memadai memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas program dan pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia sebagai pihak penyelenggara program BPNT Desa Ngerangan sudah termasuk dalam kategori baik. Hal itu ditunjukkan oleh kemampuan, keterampilan, tingkat respon, tanggungjawab, dan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan program. Selain itu, persediaan anggaran turut menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program BPNT, keterlambatan pencairan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat menimbulkan asumsi buruk masyarakat terhadap para pelaksana program BPNT di tingkat desa, padahal dalam mekanisme penyaluran bantuan, masyarakat secara langsung dapat melakukan pencairan dana melalui KKS masing-masing penerima apabila dana bantuan sudah benar-benar cair.

Berdasarkan informasi dari Ibu Tari sebagai salah satu penerima program BPNT Desa Ngerangan menjelaskan bahwa adanya pelaksanaan program BPNT di Desa Ngerangan mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dasar, dimana masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program bantuan dalam bentuk non-tunai. Diberlakukannya program BPNT di Desa Ngerangan memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak pangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama keluarga miskin yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Program ini sangat relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan pangan non-tunai yang berupa beras, telur, buah, minyak, dan kebutuhan pangan lain sebagai bentuk jaminan hak pangan warga negara dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, berdasarkan wawancara dari Saudari Sinta Candra Dewi selaku Kaur Umum dan Tata Usaha menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan program BPNT di Desa Ngerangan terdapat kecemburuan sosial yang timbul akibat penyaluran bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran, dimana masyarakat seringkali memperdebatkan masalah sasaran penerima program yang tidak valid. Masyarakat yang tergolong keluarga miskin terkadang tidak masuk dalam data penerima bantuan, tetapi masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi justru masuk dalam keluarga penerima bantuan sehingga Pemerintah Desa dituntut untuk melakukan *update* data atau pembaharuan data untuk menunjang ketercapaian tujuan program yang tepat sasaran. Program BPNT sangat perlu diberlakukan di Desa Ngerangan, karena melihat kondisi masyarakat Desa Ngerangan yang sebagian besar adalah golongan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Kondisi tersebut mendorong ketercapaian tujuan program BPNT secara optimal dan tepat sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Keluarga penerima manfaat yang notabnya berada di bawah garis kemiskinan dan memperoleh bantuan secara konsisten sudah merasa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan, walaupun belum merasakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dapat dikatakan berhasil dalam hal pencapaian tujuan program untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun dalam upaya pencapaian tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, proses penyaluran program

BPNT masih memiliki beberapa kendala mengenai minimnya tingkat pengawasan dari pihak pemerintah desa dalam memastikan penyaluran bantuan sampai pada keluarga penerima yang menjadi sasaran program dan adanya ketidakakuratan pendataan KPM sehingga ketercapaian tujuan program BPNT di Desa Ngerangan belum optimal. Dalam mekanismenya, pelaksanaan program BPNT di Desa Ngerangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prosedur yang disahkan dalam upaya pencapaian tujuan program.

Ketercapaian tujuan program BPNT yang dilaksanakan di Desa Ngerangan dipengaruhi oleh beberapa indikator yang termuat dalam *Goal-Oriented Evaluation Model* oleh Ralph W. Tyler yaitu : pertama, tujuan (*Goals*) menunjukkan bahwa tujuan program BPNT telah dilandaskan pada regulasi peraturan yang berlaku dan pengimplementasiannya telah disesuaikan dengan prosedur yang ada, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala mengenai pendataan KPM yang dianggap kurang akurat. Kedua, hasil menunjukkan bahwa besaran dana bantuan yang diterima telah sesuai yaitu Rp. 200.000/bulan yang masuk secara langsung dalam rekening penerima tanpa adanya potongan dari pihak manapun dan dapat langsung dibelanjakan pada e-warung yang ditunjuk, walaupun dalam proses pencairannya terkadang mengalami keterlambatan selama dua atau tiga bulan. Ketiga, keterlibatan *stakeholder* yang solid dan memadai dengan selalu menjunjung tinggi tanggungjawab, profesionalitas terhadap tugas, respon yang baik terhadap masukan, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap ketercapaian tujuan menjadi faktor pendorong keberhasilan program BPNT di Desa Ngerangan. Keempat, konteks program menunjukkan bahwa dukungan faktor internal dan eksternal yang terintegrasi dengan baik melalui ketersediaan sumber daya yang memadai dan respon sosial yang mendukung mendorong ketercapaian tujuan program, walaupun masih terdapat kendala mengenai kecemburuan sosial antar-masyarakat yang timbul akibat penyaluran bantuan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria keluarga miskin justru mendapat bantuan, sedangkan keluarga yang pada dasarnya masuk dalam kategori keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan program tersebut. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan dinamika sosial adalah ketidakstabilan pendapatan keluarga, keterbatasan akses pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga program BPNT tidak dapat secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa adanya peningkatan pemberdayaan ekonomi yang turut menunjang keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan peluang kerja guna mencapai kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam upaya meminimalkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten perlu dilakukan validasi data penerima BPNT secara berkala setiap tahunnya untuk memperoleh data terbaru (*up to date*) dan perlu dilakukan survei terhadap setiap KPM untuk mengetahui kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan, sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih tepat sasaran dan tujuan program dapat tercapai secara optimal. Selain itu, pemerintah harus berupaya untuk menciptakan program yang berorientasi pada peningkatan kemandirian atau pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial yang hanya memberikan *ouput* jangka pendek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Achmad. Tri Asihati. (2022). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. Indonesian Journal of Teaching and Learning : Jakarta Selatan. 1 (1). e-ISSN : 2964-1446. Hlm 79-83

Alive M. Kawung, Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1–9.

BPS. (2024). Angka Kemiskinan Negara Indonesia Tahun 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/presentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-html>

BPS. (2024). Angka Kemiskinan Kabupaten klaten. <https://klatenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDcjMg==/angka-kemiskinan.html>

Dewi, Maya Puspita. (2022). *Monitoring dan Evaluasi Program*. Universitas Esa Unggul. Hlm. 3-12.

Laheer. Masrich. (2017). *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 6 (1). ISSN : 2503-4413. Hlm. 58.

Maghfira, E. R. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo Di Kabupaten Bataeng. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full_Text.pdf

Rakhmadani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. 6(2), 232–239.

Solopos.com. (2024, Januari 5). *Daftar 4 kecamatan termiskin di Klaten, Trucuk nomor 1*. <https://solopos.espos.id/daftar-4-kecamatan-termiskin-di-klaten-trucuk-nomor-1-1698104#>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm 246.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus* [edisi dan revisi terbaru]. Yogyakarta : Center For Academic Publishing Service. Hlm. 8-9.

Wiwit. (2020). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Baru*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Hlm 32-36.

Wawancara

Wawancara kepada Bapak Agus Slamet selaku Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Ngerangan

Wawancara kepada Ibu Eka Kurniasari selaku Kasi Pelayanan Desa Ngerangan

Wawancara kepada Saudari Sinta Candra Dewi selaku Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Ngerangan

Wawancara kepada Ibu Satini selaku Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai Desa Ngerangan

Wawancara kepada Ibu Tari selaku Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai Desa Ngerangan

Wawancara kepada Ibu Tarmi selaku Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai Desa Ngerangan

Wawancara kepada Ibu Yuli selaku Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai Desa Ngerangan